

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ashhiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Azwar, Saiffudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustakan pelajar, Yogyakarta
- Carrie Menkel Meadow, 2001, *"Ethnics in ADR: The Many "Cs" of Professional Responsibility and Dispute Resolution"*, Georgetown Law Faculty Publications, United States.
- David Nicholson, 2009, *Environmental Dispute Resolution: Theoretical and Indonesian Perspective*, Brill, United States
- Dorsen, Norman, dkk., 2003, *Comparative Constitutionalism*, West Group, United States of America.
- Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Jakarta
- Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan : Teknik dan Cara Pembentukannya*, PT Kanisius, Jakarta
- Hoesien, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta .
- Kelsen, Hans, 1978, *Pure Theory of Law*, University of California Press, London,.
- L. Boule, 1996, *Mediation: Principles, Process, Practice*, Butterworths, Sydney
- Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang

- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Phillips, O. Hood, dkk., 2001, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet and Maxwell, London.
- Sulardi, 2012, *Sistem Pemerintahan Presidensil*, Setara Press, Malang
- Susanti, Dyah Ochtorina, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika ,Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sourdin, Tania, 2002, *Alternative Dispute Resolution*, Lawbook Co., Australia

B. JURNAL

- Condliffe, Peter, "The Mediation of Public Issues Disputes: Seven Key Issues, 1998", *Australian Dispute Resolution Journal*, Vol 9, November
- Goodman, Ronald E. M., "Cociliation, Mediation, and Dispute Resolution", *American Society of International Law Journal*, Vol. 90, March 1996
- Kishore, G. Gokul and M Suresh Babu, " Independence and Prismatic Factors in Quasi Judicial Sphere of Union Revenue Administration A Study", *The Indian Law Journal of Political Science*, Vol. 67, No. 3, Septemeber 2006
- Kochan, Thomas A. And Todd Jick, " The Public Sector Mediation Process: A Theory and Empirical Examination", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 22, No. 2, Juny 1978
- Lyons, W.E., "Making Judges out of Legislators: Rezoning on a Quasi Judicial Model", *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 8, No. 4, November 1983

Muhlidi, Arfan Faiz, “ Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan ekonomi Nasional”, *Jurnal RechtsVinding*, Vo. 6, No. 3., Desember 2017

Prabandani, Hendra Wahanu, “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 12, No. 3 , Oktober 2015

Sunstein, Cass R dan Lawrence Lessig, “The President and the Administrative”, *Columbia Law Review*, Vol. 94, No. 1, 1994

Wade, H. W. R., “ Quasi Judicial” and Its Background, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 10, No. 2, 1949

C. Laporan Penelitian

Anjaz, Istighfaro, 2017, *Implikasi Kedudukan Wakil Presiden dan Menteri Sebagai Pembantu Presiden Terhadap efektivitas Pemerintahan Dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hartono, Luthfi Dwi, 2018, *Disparitas Karakteristik Putusan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

D. Makalah

Asshiddiqie, Jimly, “Pengadilan Khusus”, *Makalah*, www.jimly.co.id, diakses pada 07 Oktober 2018

Anggono, Bayu Dwi, “Perkembangan Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusi”, *Makalah*, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4, 2017.

Sepria, Erik, “Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia”, *Makalah*, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4, 2017.

Dian Agung Wicaksono dan Muhammd Lutfi, “Kompatibilitas Karakteristik Pengujian Peraturan Pada Mahkamah Agung Dalam Pengujian Produk Hukum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016”, Prosiding KNHTN Ke-4, *Makalah*, 2017

E. Internet

Anonim, “Menteri Hukum dan HAM Akhirnya Teken PKPU Larangan Eks Koruptor Caleg. Begini Ceritanya”, <http://kupang.tribunnews.com/2018/07/04/menteri-hukum-dan-ham>

[akhirnya-teken-pkpu-larangan-eks-koruptor-caleg-begini-ceritanya](#) diakses pada 24/09/2018

Anonim, "Pendaftar Uji Materil di MA Rata-Rat Sebulan Cuma Tiga", <https://www.rmol.co/read/2018/04/12/335043/Pendaftar-Uji-Materiil-Di-MA-Rata-rata-Sebulan-Cuma-Tiga->, diakses 16 September 2018

Ira Sasmita, "Pembagian Kewenangan Desa Dinilai Hanya Kompromi Politik", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/14/ni5y6w-pembagian-kewenangan-desa-dinilai-hanya-kompromi-politik> diakses pada 23 September 2018

Yuliana Ratnasari, "KPU Sahkan Larangan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg di Pemilu 2019", <https://tirto.id/kpu-sahkan-larangan-eks-napi-koruptor-jadi-caleg-di-pemilu-2019-cNje> diakses pada 24/09/2018

Yoga Sukmana, "MA Usul Biaya Perkara Naik Jadi 5 Juta, Untuk Apa Saja?" <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/07573471/ma-usul-biaya-perkara-naik-jadi-rp-5-juta-untuk-apa-saja>, diakses pada 17 September 2018

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-Litigasi

G. Lain-Lain

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah

Transkrip wawancara bersama Ibu Ninik Harwanti S.H., L.LM. pada hari Jumat, tanggal 21/09/2018, pukul 13.30.00WIB, di R. Direktur Direktorat Litigasi

Transkrip wawancara bersama Ibu Rahayu S.H., L.LM. pada hari Jumat, tanggal 28/09/2018, pukul 13.30 WIB, di R. Rapat Direktorat Litigasi

Transkrip wawancara bersama Bapak Hernandi S.H., M.H., pada hari Senin, tanggal 17/09/2018, pukul 10.00 WIB, di R. Kasubag Harmonisasi

Transkrip wawancara bersama Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., pada hari Kamis, 20/09/2018, pada pukul 19.30 WIB, di Hotel Luwansa

Transkrip wawancara bersama Bapak Jimmy Usfunan S.H., M.H., pada hari Jumat, tanggal 21/09/2018, pukul 10.00 WIB, di Direktorat Jendral PP

Berita Acara Pemeriksaan Perkara No. 16/NL/2018

Berita Acara Pemeriksaan Perkara No. 18/NL/2018

Berita Acara Pemeriksaan Perkara No. 23/NL/2018

Berita Acara Pemeriksaan Perkara No. 25/NL/2018